



AJUK

Menangkal Suap dan Pemerasan

Boleh juga cara yang digunakan Rommy Hartono Theos, seorang saksi kasus korupsi di Takalar, Sulawesi Selatan, saat bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Rakhmat Harianto. Dalam pertemuan itu, Rommy merekam pembicaraan dengan telepon seluler. Terbongkarlah aib, di mana sang saksi mencoba memeras Rommy uang senilai Rp500 juta. Hasil rekaman itu dimasukkan ke dalam cakram DVD sebagai barang bukti saat melaporkan tindakan Rakhmat.

Cara-cara seperti dilakukan Rommy memang perlu untuk memupuskan praktik-praktik korupsi yang tidak kunjung habis. Sejak reformasi 13 tahun lalu, boleh dibilang korupsi justru makin berkembang. Korupsi makin bervariasi dengan cara-cara makin rumit. Kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, korupsi sekarang bahkan makin marak di daerah.

Satu bentuk korupsi yang paling sering dilakukan adalah suap. Model lain adalah pemerasan oleh penegak hukum. Berbagai kasus suap dan pemerasan di banyak lembaga berhasil diungkap KPK. Misalnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta banyak lembaga lainnya. Di KPK, penyidik AKP Suparman bahkan pernah divonis karena suap.

Meskipun sudah banyak yang tertangkap dan terungkap, kasus suap dan pemerasan tak juga berhenti. Setiap saat datang silih berganti. Maka itu, cara-cara seperti yang dilakukan Rommy merekam pembicaraannya dengan jaksa bisa dicoba sebagai salah satu kiat menjebak pelaku korupsi. Di luar itu, butuh cara-cara lain yang di luar akal agar budaya korupsi, terutama suap dan pemerasan, sedikit demi sedikit makin terkikis.

Sebuah lembaga swadaya masyarakat di India, Fifth Pillar, misalnya, punya cara cerdas untuk mengampalkan pemberantasan suap. Mereka menerbitkan uang rupee palsu dalam jumlah jutaan lembar bernilai nol rupee. Ada gambar Mahatma Gandhi dalam uang palsu itu serta tulisan, saya berjanji tidak memberi atau menerima suap.

Masih dari India, penasihat ekonomi utama Kementerian Keuangan India Kaushik Basu pernah mengusulkan agar pemberi suap bebas dari tuntutan hukum. Usulan muncul karena di India, hukum memperlakukan pemberi dan penerima suap sebagai tindak kejahatan. Basu menilai, hal ini mempersulit pembasmian para pejabat yang korup karena pemberi suap juga melanggar hukum. Jika mengeluh, pemberi suap terkena risiko penuntutan. Nah, apabila pemberi suap dilegalkan, kepentingan pemberi dan penerima bertabrakan, dan sangat mungkin si pemberi akan melaporkan dan penerima suap akan tertangkap.

China juga punya cara-cara yang mengandalkan teknologi untuk menjerat koruptor. Pemerintah China menyusun situs internet di setiap provinsi yang memungkinkan publik menyampaikan laporan tentang hakim-hakim nakal. Laporan itu secara otomatis akan terkirim ke situs pusat. Ketika sebuah laporan masuk, hakim diminta merespons laporan dalam kurun 10 hari. Pengawas hakim lantas diwajibkan mengabarkan penanganan terhadap keluhan publik di situs tersebut. Dengan cara ini, pelapor akan mendapatkan jawaban apakah laporannya diurus atau diabaikan.

Segala macam cara memang perlu dilakukan untuk memupus korupsi yang berakar kuat dan tumbuh subur. Peran masyarakat akan sangat membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi tersembunyi. Lebih penting lagi, untuk membersihkan lantai korupsi yang kotor, sapunya harus bersih, dan pembersihan harus dimulai dari atas. ●

Generasi Muda, Presiden, dan Masa Depan Indonesia

BAHTIAR
EFFENDYGuru Besar Ilmu Politik Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta

Beberapa hari terakhir ini muncul wacana agar pada 2014 nanti tokoh-tokoh senior tidak lagi mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Hal ini dimunculkan, secara tidak bersamaan, oleh Taufik Kiemas, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Amien Rais. Dalam pandangan Amien Rais, yang dimaksud sebagai tokoh senior adalah mereka yang sudah berumur di atas 60 tahun. Dalam konteks kandidat presiden, pernyataan ini mengenai tokoh-tokoh seperti Wiranto, Megawati, Prabowo Subiyanto, dan Akbar Tanjung.

Meski ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie juga sudah berumur 60 tahun lebih, tampaknya dia bukan termasuk tokoh yang dibidik. Jika demikian halnya, sebetulnya yang dituju Amien Rais, mungkin juga Taufik Kiemas dan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah para tokoh politik yang pada 1999, 2004, dan 2009 pernah bersangkutan dengan pencalonan presiden—baik sebagai kandidat presiden atau mereka yang terlibat dalam konvensi partai untuk menentukan figur calon presiden.

Sebenarnya soal batasan umur ini bukan persoalan substansial. Di atas atau di bawah usia 60 tahun, tercatat sebagai generasi senior atau yang lebih muda, bukanlah hal yang penting dalam dunia politik di Tanah Air. Tidak seperti Uni Soviet (dulu) dan China, gerontokrasi adalah sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah dalam kepemimpinan nasional kita. Baik Soekarno maupun Soeharto muncul sebagai pemimpin nasional dalam usia yang relatif muda. Meski demikian, karena hal itu disuarakan oleh pelaku-pelaku terkemuka politik di negeri ini, yang tentu saja didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik tertentu, serta-merta kita terdoda untuk terlibat mem-

bicarakannya.

Kita tidak tahu persis mengapa para tokoh itu mengalirkan masalah regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Jika kita harus menebak dengan penuh prasangka baik, barangkali niat politik mereka didasarkan atas kenyataan bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat, dan cenderung bertambah dari hari ke hari. Karena itu diperlukan pemimpin yang lebih muda. Perkiraan adalah bahwa generasi muda lebih energik, penuh vitalitas, dan mungkin tanpa beban.

Kekosongan

Akan tetapi, penting diketahui bahwa persoalan kepemimpinan yang telah mengurita di Indonesia, terutama sejak satu dasawarsa terakhir, tidak ada kaitannya dengan soal kurangnya energi atau vitalitas di dalam memimpin. Jika boleh menyimpulkan dari perjalanan kepemimpinan sepuluh tahun terakhir, tentu dari sudut pandang orang-orang yang dipimpin, masalah pokok yang membelenggu para pemimpin kita adalah tidak adanya apa yang oleh Max Weber disebut *beruf* atau panggilan kepemimpinan.

Karenanya yang tampak adalah tiadanya kesungguhan, keseriusan, dan keikhlasan untuk memimpin. Jika kompetensi ditambahkan di dalam susunan persyaratan ini, maka hal itu sebanding dengan yang pernah diajarkan Nabi Muhammad bahwa syarat untuk menjadi pemimpin itu *shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah*.

Kekosongan panggilan ini mungkin merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Sebab, ketika kita berusaha untuk memutus hubungan dengan orde pemerintahan sebelum reformasi, semangat kuat yang mun-

cul adalah menghentikan kepemimpinan Soeharto. Rasa bebas dari rezim Orde Baru ini kemudian ditafsirkan sebagai kebolehan untuk berkuasa.



SINDO/QOMAR

Gegap gempitanya masyarakat politik di Tanah Air untuk membikin partai politik, menjadi anggota legislatif, yang kemudian diteruskan dengan semangat untuk menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya mengabaikan prasyarat moral yang disebut *calling* atau panggilan itu. Karenanya, politik dianggap semata-mata sebagai komoditas yang diperebutkan; menjadi pemimpin nasional—baik di tingkat pusat maupun daerah—dianggap dan diperlakukan sebagai pekerjaan.

Kosong dari persyaratan moral seperti ini bisa mengena semua pemimpin. Penyakit ini bersifat lintas umur. Karenanya, alih generasi dalam konteks kepemimpinan nasional 2014 tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia.

Prasyarat Moral

Untuk itu sebenarnya yang

harus diinjeksikan dalam ranah kepemimpinan nasional bukan keharusan mereka yang di bawah umur 60 tahun untuk memimpin. Akan tetapi prasyarat moral yang bernama keikhlasan, kesungguh-sungguhan, atau keseriusan. Dengan bantuan persyaratan moral itu diharapkan mereka yang (balkal) memimpin republik ini tidak memperlakukan posisi atau jabatan sebagai pekerjaan, melainkan amanah atau panggilan tadi.

Regenerasi adalah hal yang bagus. Akan tetapi yang kita perlukan sekarang ini bukan regenerasi dalam konteks bilangan umur kronologis, melainkan regenerasi dalam konteks sirkulasi elite dari yang memperlakukan jabatan sebagai pekerjaan ke mereka yang bersedia melihat posisi sebagai amanah dan panggilan. Sepuluh tahun terakhir ini telah cukup mengajarkan kepada kita bahwa tidak sedikit dari mereka yang berumur di bawah 60 tahun berlaku sama dan sebanding dengan senior mereka. Baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak banyak yang dapat dijadikan contoh sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh, ikhlas, dan serius.

Kecuali kita bisa memproses alih generasi dalam konteks yang kita bicarakan, pemilu pada 2014 nanti tidak akan mendatangkan perubahan yang substansial. Pemilu 2014 hanya akan mendatangkan penilaian bahwa kepemimpinan nasional Indonesia (hanya) "berbeda", tetapi tidak "berubah".

Sekali lagi, letak persoalannya tidak ada pada perbedaan umur. Tanpa panggilan, *beruf, calling*, dan sebagainya itu, pemilu Indonesia hanya akan menghasilkan sederet orang yang—meminjam istilah Samuel Huntington—ingin berkuasa (*to rule*), tetapi tidak bersedia untuk memerintah (*to govern*). ●

”
Letak persoalannya tidak ada pada perbedaan umur. Tanpa panggilan, *beruf, calling*, dan sebagainya itu, pemilu Indonesia hanya akan menghasilkan sederet orang yang ingin berkuasa, tetapi tidak bersedia untuk memerintah.

SEPUTAR
INDONESIA

Pimpinan Umum: Hary Tanoesoedibjo

Wakil Pimpinan Umum/Pemimpin Perusahan: Syafril Nasution

Wakil Pimpinan Perusahan: Henry Suparman, Priscilla Diana Airin

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Sururi Alfarruz

Wakil Pemimpin Redaksi: Nevy AN Hetharia, Pung Purwanto Redaktur Pelaksana: Djaka Susila, Titis Widyatmoko Wakil Redaktur Pelaksana: Alex Aji Saputra, Dwi Sasongko, Masrom Redaktur: Achmad Faisal Nasution, Abdul Hakim, Alviana Harmayani Masrifah, Army Dian Kurniawan, Azhar Azis, Boy Iskandar, Danang Aradiani, Hatim Yarabi, Mohammad Ridwan, Mohammad Faizal, Nur Cholis, Shalahuddin, Sujoni, Supriyadi, Syafril Rasyid, Widaningsih, Wuri Hardiastuti, Nury Adriansyah, Zen Teguh Triwibowo

Asisten Redaktur: Abdul Harris, Abdul Rochim, Adam Prawira, Ahmad Baidowi, Agus Warsudi, Agung Nugroho BS, Ainun Najib, Andi Dwi Ananto, Anton Christiyanto, Chamad Hojin, Donatus Nador, Edi Purwanto, Edi Yulianto, Estu Santoso, Fakhur Haqiqi, Hanna Farhana, Harley Ikhsan, Hatta Sujatmin, Helmi Firdaus, Hermanto, Herita Endriana, Hendri Irawan, Kastolani, Maruf, Maria Christina Malau, Muhammad Yamin, Muhibudin Kamali, M Iqbal, Nur Iwan Tri Hendrawan, Pajjo, Pangeran Ahmad Nurdin, Pughu Hariyanto, Rakhmat Baihaqi, Rusman Hidayat Siregar, Sah Pawiatan, Sazili Mustofa, Slamet Parsono, Sudarsono, Sugeng Wahyudi, Suriya Mohamad Said, Sunu Hastoro Fahrurrozi, Suwarno, Syarifudin, Tedy Achmad, Thomas Pulungan, Titi Sutinah Abridawaty, Vitrianda Hilba Siregar, Wasis Wibowo, Wahyu Sahala Tula, Wahyono, Yanto Kusdiantono, Yan Muhandiansyah, Yogi Pasha

Reporter: Bernadette Lilia Nova, Denny Irawan, Fefy Dwi Haryanto, Firda Puri Agustine, Haryudi, Hendrati Hapsari, Helmi Syafril, Hermansah, Indra Susanti, Isfari Hikmat, Islahuddin, Juni Triyanto, Khollil Rokhman, Krisandi Sacaviasastra, M Purwadi, Maesaroh, Megiza, MN Latief, Muhammad Sahlan, Neneng Zubaidah, Novia Sang Ayu Lesthia K, Nurul Huda, Pasti Libert Mappapa, Rendi Saputra, Rahmat Sahidi, Rarasati Syafril, Rendra Hanggara, Roni Paslah, Sri Noviani, Susi Susanti, Sofian Dwi, Sucipto, Teguh Mahardika, Wahab Firmansyah, Wahyu Argianto, Wisnoe Moerti

Manager Litbang: Wiendy Hapsari

Redaktur Bahasa: Jaelani Ali Muhammad

Koordinator Fotografer: Aziz Indra

Fotografer: Arie Yudhistira, Astra Bonardo, Eko Purwanto, Hasiholan Siahaan, Ratman Suratman, Yulianto, Yudhistiro Pranoto
Manager Artistik: Wisnu Handoko

Direktur Sirkulasi & Distribusi: Sugeng H. Santoso

GM Sales: Lia Marlina, Kiki Subarkah

GM Marketing & Communications: Caecilia Hamzah

GM Sirkulasi & Distribusi: Donny Irawan

Rate iklan 2011 untuk edisi hari Sabtu-Kamis:
Display FC: Rp107.000/mmk, Display BW: Rp70.800/mmk, Display Spot Colour: Rp82.400/mmk, Halaman 1: Rp175.900/mmk, Halaman 3: Rp112.500/mmk, Halaman 5: Rp112.500/mmk, Halaman 7: Rp110.200/mmk, Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi dan Bisnis: Rp127.300/mmk FC, Creative Ad/Island Ad: Rp42.100/mmk FC, Center spread: Rp116.100/mmk FC, Laporan Keuangan/Prospektus/Neeraca FC: Rp43.000/mmk, BW: Rp39.700/mmk, Sosial/Duka Cita FC: Rp92.700/mmk, BW: Rp39.700/mmk.

Rate iklan 2011 untuk edisi hari Jumat:
Display FC: Rp117.000/mmk, Display BW: Rp78.000/mmk, Display Spot Colour: Rp91.000/mmk, Halaman 1: Rp195.000/mmk, Halaman 3: Rp124.000/mmk, Halaman 5: Rp124.000/mmk, Halaman 7: Rp124.000/mmk, Halaman Cover Lifestyle, Sport, Referensia, Ekonomi dan Bisnis: Rp140.000/mmk FC, Creative Ad/Island Ad: Rp42.100/mmk FC, Center spread: Rp128.000/mmk FC, Laporan Keuangan/Prospektus/Neeraca FC: Rp47.000/mmk, BW: Rp44.000/mmk, Sosial/Duka Cita FC: Rp102.000/mmk, BW: Rp44.000, Iklan Kolom BW: Rp46.500/mmk, Baris: Rp51.500/mmk

Layanan Langganan: (021) 3911518, Fax: (021) 3927958
Iklan Display: (021) 3915634, Fax: (021) 3927721
Iklan Baris/Kolom, Divisi Sirkulasi dan Distribusi: MNC Tower Lt.9, Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19 Jakarta Pusat. Telepon/Fax: (021) 3914672.

E-mail: redaksi@seputar-indonesia.com, cs@seputar-indonesia.com
iklankolom@seputar-indonesia.com, iklanbaris@seputar-indonesia.com

Penerbit: PT Media Nusantara Informasi,

Percetakan: PT Media Nusantara Press

Bank: BCA Cabang Wahid Hasyim A/C 478 301152-5,

Anggota SPS Nomor 404/2005/11/2011, Terbit Tujuh Kali Seminggu.
Alamat: MNC Tower Lt. 22, Jalan Kebon Sirih Raya No. 17-19, Jakarta 10340.
Telepon (Hunting): (021) 3926955, Fax: (021) 3927958,
Redaksi: (021) 3926955, Fax: (021) 3927721

Wartawan Seputar Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang meminta / menerima apa pun dari narasumber

KPK Baru dan Agenda Pemberantasan Korupsi

VISHNU
JUWONOKandidat Doktor Bidang Sejarah
Internasional di London School of
Economics (LSE), London, Inggris,
sebagai Jardine Scholar

Dengan dilantikannya Abraham Samad dan rekan-rekan sebagai pimpinan KPK periode 2011–2015 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu, maka mereka resmi memimpin institusi terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut. Ekspektasi masyarakat terhadap KPK tentu akan semakin tinggi, terlebih lagi terdapat kritikan yang cukup tajam terutama dari media serta aktivis antikorupsi mengenai kemungkinan kompromi politik dalam pemilihan pimpinan KPK.

Disisilain, dengan pemilihan figur Abraham Samad sebagai ketua KPK yang masih relatif berusia muda—untuk standar umur pejabat tinggi di Indonesia—serta steril dari lingkungan elite Jakarta, setidaknya memberi harapan bahwa nantinya beliau akan lebih tegas, dinamis, dan independen.

Dari aspek legalitas hukum, KPK mempunyai kedudukan hukum yang paling kuat, yakni dibentuk melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal penting yang membedakan KPK dengan tim atau lembaga sejenis dalam sejarah Indonesia adalah mereka dapat merekrut sendiri sebagian besar stafnya tanpa terikat oleh keharusan menggunakan aparaturnegara.

Namun, untuk penyidik serta penyelidik, KPK tetap terikat aturan undang-undang untuk menggunakan tenaga polisi dan jaksa untuk menjalankan fungsi tersebut yang menjadi titik lemah dari segi organisasinya.

Kemudian, KPK juga diberi wewenang melakukan penyadapan: otoritas yang penting karena pekerjaan KPK meng-

andalkan bukti langsung bahwa terduduk koruptor menerima suap. Contoh keberhasilan wewenang penyadapan adalah kasus jaksa Urip pada 2008 dan Jaksa Sistojo pada 2011 yang tertangkap saat menerima dana suap sebesar hampir Rp6 miliar dan Rp100 juta.

Kerja sama yang baik dengan Presiden SBY merupakan kunci keberhasilan KPK dalam menjalankan fungsinya selama ini. Menurut ketentuan hukum, untuk memeriksa pejabat tinggi aktif KPK harus memperoleh izin dari Presiden.

Setidaknya hingga kini Presiden SBY memberikan kemudahan dalam pemberian izin tersebut seperti kepada para beberapa anggota DPR maupun kepala daerah yang masih aktif menjabat. Diperkirakan hampir 100 izin bagi pemeriksaan pejabat negara/pemerintahan yang telah dikeluarkan oleh KPK.

Kemudian dari segi sumber daya, baik dana maupun fasilitas, KPK memperoleh dana melalui APBN yang relatif cukup untuk menunjang operasinya. Selama 2010 KPK telah merealisasikan Rp264 miliar lebih anggarannya (KPK, 2010). Tentu kita masih ingat bagaimana ketidakoptimalan komisi atau lembaga bergerak pada isu antikorupsi di masa lalu yang sumber dananya tidak memadai. Misalnya Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional dan beberapa institusi lain.

Karenanya hubungan kerja antara Presiden dan KPK merupakan suatu kemitaan yang sangat penting dalam konteks reformasi institusi di Indonesia. Mungkin tingkat kepentingannya bisa disamakan dengan hubungan Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam usaha menjaga stabilitas politik nasional baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Tentu saja sebagai lembaga negara yang kiprahnya selalu disorot oleh media, maka KPK juga menaui berbagai macam kritikan. Yang paling sering digugat adalah masalah diskriminasi yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan kegiatan penindakan hukum. KPK dianggap tidak dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan figur-figur dalam lingkaran kekuasaan.

Kemudian juga dalam melakukan tindakan prosekusi terhadap para pejabat pemerintah menjadi enggan membuat keputusan. Hal ini disebabkan mereka tidak ingin nantinya keputusannya berimplikasi pada tuntutan dirinya oleh KPK karena diduga terlibat korupsi di masa mendatang.

Mendorong Reformasi Institusi

Dengan jumlah staf kurang lebih 400 pegawai dan berdiri hanya lebih dari 7 tahun, KPK dianggap sebagai institusi anti-korupsi yang cukup berhasil dalam sejarah Indonesia. Bahkan keberhasilannya diakui pada tingkat internasional dengan diberikannya *integrity award* oleh Bank Dunia pada 2010 kepada Chandra Hamzah.

Setidaknya KPK bersama Presiden SBY, melalui kegiatan penuntutan hukum, sudah dapat menurunkan efek imunitas bagi para pejabat dan mantan pejabat yang diduga melakukan korupsi. Saat ini para pejabat dan mantan pejabat akan berpikir lebih panjang apabila

ingin melakukan korupsi.

Pekerjaan yang paling mendesak di masa mendatang adalah bagaimana KPK dan Presiden SBY membantu mendorong reformasi institusi di lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian RI, Jaksa Agung, serta Mahkamah Agung. Saat ini terlihat ketiga lembaga tersebut merasa dipermalukan dengan tindakan KPK menangkap aparaturnegara yang terlibat korupsi.

Karenanya merupakan tantangan besar bagi Abraham Samad serta Presiden SBY, selain terus meningkatkan prosekusi terhadap koruptor tapi juga dilakukan pendekatan institusi serta komunikasi yang terpadu terhadap ketiga lembaga tersebut akan pentingnya reformasi institusi di instansi masing-masing.

Apabila dilihat pada kasus di negara Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong; inisiatif antikorupsi yang berhasil adalah bila institusi penegak hukumnya berhasil direformasi sehingga aparaturnegara dapat melaksanakan tugas dengan baik, dihormati, serta mempunyai integritas tinggi.

Akibatnya, lembaga antikorupsi seperti KPK perannya akan menjadi jauh lebih berkurang dengan kondisi institusi penegak hukum yang relatif bersih dan independen. Tentu ini pekerjaan rumah besar bagi pimpinan KPK saat ini dan Presiden SBY untuk mewujudkan tugas yang mahabratini.

Artikel ini berasal dari makalah yang dipresentasikan penulis pada acara diskusi Governance and Reform in Indonesia di Chatham House, London, pada awal Desember 2011.